

NEWS

Dr. Hendri: Perang Kognitif dan Rapuhnya Daya Kritis Masyarakat Digital

Updates. - TNIAD.NET

Jan 8, 2026 - 21:21



OPINI - Di era digital, medan perang tidak selalu berupa wilayah, senjata, atau garis perbatasan. Medan perang baru justru hadir dalam ruang yang jauh lebih sunyi: pikiran manusia. Inilah yang membuat perang kognitif menjadi ancaman strategis yang berbahaya. Ia tidak selalu datang dalam bentuk serangan terbuka, tetapi melalui banjir informasi, manipulasi emosi, distorsi fakta, framing politik, algoritma media sosial, potongan video, meme, hoaks, hingga narasi yang sengaja dirancang untuk melemahkan kemampuan publik dalam berpikir jernih.

Perang kognitif pada dasarnya berupaya memengaruhi cara manusia memahami realitas, menilai kebenaran, mengambil keputusan, serta mempercayai atau mencurigai institusi. Dalam kajian terbaru, perang kognitif dipahami sebagai upaya memanfaatkan teknologi, psikologi, dan informasi untuk menghasilkan efek kognitif pada individu maupun masyarakat, termasuk memengaruhi perilaku dan proses pengambilan keputusan (Deppe & Schaal, 2024). Dengan kata lain, sasaran utamanya bukan hanya data atau sistem komunikasi, melainkan kesadaran manusia itu sendiri.

Masalahnya, masyarakat digital hari ini hidup dalam ekosistem informasi yang sangat cepat, tetapi tidak selalu disertai daya kritis yang memadai. Banyak orang mampu mengakses informasi, tetapi belum tentu mampu memverifikasi. Banyak orang aktif membagikan berita, tetapi belum tentu membaca utuh. Banyak orang merasa tahu, padahal hanya sedang mengulang potongan narasi yang disodorkan algoritma. Di sinilah kerapuhan daya kritis masyarakat digital menjadi pintu masuk bagi perang kognitif.

Dalam ruang digital, informasi palsu sering kali lebih menarik daripada kebenaran. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan berita benar di platform digital. Salah satu sebabnya adalah karena informasi palsu sering dibuat lebih mengejutkan, emosional, dan sesuai dengan rasa ingin tahu publik. Inilah ironi masyarakat digital: yang benar sering kalah cepat dari yang sensasional.

Perang kognitif bekerja dengan memanfaatkan kelemahan ini. Publik tidak selalu diserang dengan kebohongan besar secara langsung. Kadang yang disebarkan adalah setengah fakta, potongan video tanpa konteks, judul provokatif, statistik yang dipilih sebagian, atau narasi yang dibuat seolah-olah masuk akal. Tujuannya bukan selalu membuat masyarakat percaya pada satu kebohongan tertentu, tetapi membuat masyarakat bingung, lelah, curiga, dan kehilangan pegangan bersama terhadap fakta.

Ketika kebingungan menjadi massal, daya kritis melemah. Orang tidak lagi bertanya, "Apakah ini benar?" tetapi langsung bereaksi: marah, takut, benci, atau ikut menyebarkan. Padahal penelitian Pennycook dan Rand (2019) menunjukkan bahwa kerentanan terhadap berita palsu lebih banyak berkaitan dengan rendahnya penalaran analitis daripada sekadar bias politik. Artinya, masalah utama bukan hanya soal keberpihakan, tetapi soal kebiasaan berpikir yang malas, cepat menyimpulkan, dan enggan memeriksa.

Di media sosial, kerapuhan ini diperparah oleh ruang gema atau echo chamber. Pengguna cenderung berinteraksi dengan informasi dan kelompok yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, keyakinan lama terus diperkuat, sementara pandangan berbeda dianggap ancaman. Del Vicario et al. (2016) menunjukkan bahwa komunitas digital dapat membentuk polarisasi dan ruang gema yang memperkuat keterlibatan emosional pengguna. Ketika seseorang hanya mendengar suara yang sama berulang kali, ia mudah merasa bahwa kelompoknya paling benar dan kelompok lain pasti salah.

Dalam konteks perang kognitif, echo chamber adalah lahan subur. Narasi

kebencian, kecurigaan terhadap negara, delegitimasi institusi, atau provokasi identitas dapat tumbuh cepat karena publik tidak lagi berdialog dengan fakta, melainkan dengan pantulan emosinya sendiri. Ruang digital kemudian berubah menjadi arena penguatan prasangka. Orang bukan mencari kebenaran, tetapi mencari membenaran.

Lebih berbahaya lagi, koreksi terhadap informasi palsu tidak selalu mudah diterima. Lewandowsky, Ecker, Seifert, Schwarz, dan Cook (2012) menjelaskan bahwa misinformasi dapat tetap memengaruhi ingatan dan penilaian seseorang bahkan setelah informasi tersebut dikoreksi. Ini berarti klarifikasi sering datang terlambat. Ketika hoaks sudah menyentuh emosi publik, bantahan faktual belum tentu mampu menghapus dampaknya.

Maka, perang kognitif tidak bisa dilawan hanya dengan memperbanyak klarifikasi. Klarifikasi penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah membangun daya kritis masyarakat sejak awal. Daya kritis berarti kemampuan untuk menunda reaksi, memeriksa sumber, membaca konteks, membandingkan informasi, mengenali manipulasi emosi, dan berani mengatakan “saya belum tahu” sebelum ikut menyebarkan.

Machete dan Turpin (2020) menegaskan bahwa berpikir kritis merupakan bagian penting dari literasi informasi untuk mengenali berita palsu, terutama melalui kemampuan mengevaluasi bukti, menilai kredibilitas sumber, dan menguji kelayakan argumen. Dalam masyarakat digital, literasi tidak boleh berhenti pada kemampuan memakai gawai atau mengakses internet. Literasi sejati adalah kemampuan menjaga akal sehat di tengah banjir informasi.

Karena itu, masyarakat digital membutuhkan tiga benteng utama. Pertama, literasi sumber. Setiap informasi harus diuji: siapa yang mengatakan, dari mana datanya, apa kepentingannya, dan apakah ada sumber pembanding yang kredibel. Kedua, literasi emosi. Setiap konten yang terlalu memancing marah, takut, jijik, atau benci harus dicurigai sebagai kemungkinan manipulasi. Ketiga, literasi algoritma. Publik harus sadar bahwa linimasa media sosial bukan cermin objektif realitas, melainkan hasil kurasi sistem yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna.

Negara, media, kampus, sekolah, organisasi masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang cepat, transparan, dan konsisten. Media harus kembali menegakkan disiplin verifikasi, bukan ikut larut dalam sensasi klik. Kampus dan sekolah harus menjadikan literasi digital sebagai pendidikan nalar, bukan sekadar pelatihan teknis. Keluarga pun perlu membiasakan diskusi sehat agar anak-anak tidak tumbuh sebagai konsumen pasif algoritma.

Perang kognitif tidak dapat dilawan dengan kepanikan. Ia harus dilawan dengan ketahanan berpikir. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikaji adalah inoculation atau “vaksinasi psikologis” terhadap misinformasi, yaitu membekali masyarakat untuk mengenali pola manipulasi sebelum mereka terpapar informasi palsu. Roozenbeek et al. (2022) menemukan bahwa pendekatan inokulasi psikologis dapat meningkatkan ketahanan terhadap misinformasi di media sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa dilatih untuk lebih tangguh secara kognitif.

Pada akhirnya, rapuhnya daya kritis masyarakat digital bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi masalah ketahanan nasional. Bangsa yang masyarakatnya mudah percaya hoaks akan mudah diprovokasi. Bangsa yang publiknya lelah memeriksa fakta akan mudah diarahkan oleh propaganda. Bangsa yang ruang digitalnya dipenuhi kebencian akan sulit membangun kepercayaan sosial.

Perang kognitif mengajarkan satu hal penting: masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, militer, atau teknologi, tetapi juga oleh kualitas berpikir warganya. Jika masyarakat kehilangan daya kritis, maka kebenaran akan kalah oleh kebisingan, akal sehat akan kalah oleh emosi, dan demokrasi akan kalah oleh manipulasi.

Karena itu, membangun daya kritis masyarakat digital bukan pekerjaan tambahan, melainkan agenda strategis. Di tengah banjir informasi, kemampuan berpikir jernih adalah bentuk bela negara. Di tengah perang narasi, keberanian memeriksa fakta adalah bentuk patriotisme. Dan di tengah serangan terhadap pikiran publik, menjaga akal sehat adalah garis pertahanan pertama bangsa.

Jakarta, 08 Januari 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)